

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024



**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Kubu Raya**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi

DAFTAR ISIii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB 1. PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum.....2

1.3. Maksud dan Tujuan7

1.3.1. Maksud7

1.3.2. Tujuan.....8

1.4. Sistematika Penulisan8

BAB 2. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU 16

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD..... 16

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD..... 21

2.2.1.Target dan Realisasi Kinerja21

2.2.2.Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi22

2.2.3.Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....25

2.2.4.Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.27

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ... 35

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 43

2.5. Penelaahan Usulan Progam dan Kegiatan Masyarakat 50

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN 55

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 55

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 60

3.2.1. Tujuan..... 60

3.2.2. Sasaran 60

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 61

BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
..... 70

BAB 5. PENUTUP 75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD.....	16
Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
Tabel 3. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya	25
Tabel 4. Matriks Internal Faktor Analysis Strategy (IFAS)	30
Tabel 5. Matriks Eksternal Factor Analysis Strategy (EFAS).	30
Tabel 6. Penentuan Strategi Pembangunan Pertanian	34
Tabel 7. Variabel Yang Diduga Mempengaruhi Kinerja Pertanian	36
Tabel 8. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahu 2023 ...	44
Tabel 9. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	50
Tabel 10. Hasil Rakortek Bidang PSP Tahun 2023.....	57
Tabel 11. Hasil Rakortek Bidang Hortikultura Tahun 2023	58
Tabel 12. Hasil Rakortek Bidang Tanaman Pangan Tahun 2023 .	59
Tabel 13. Tujuan dan Indikatornya	60
Tabel 14. Sasaran dan Indikatornya	61
Tabel 15. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	61
Tabel 16. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Analisis Diagram SWOT Strategi Pembangunan Pertanian 33

Gambar 2. Matrik Hubungan Langsung 39

Gambar 3. Peta Variabel Menurut Pengaruh dan Ketergantungan40

Gambar 4. Grafik Hubungan Tidak Langsung Antar Variabel..... 41

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD dalam kurun waktu satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;

- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

- tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 43);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);

23. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya

- Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 43);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76);
 28. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 105);
 29. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 61).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana kerja tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2019-2024, sebagai dokumen perencanaan pembangunan ketahanan pangan, pertanian tanaman pangan, hortikultura, sarana prasarana pertanian, peternakan dan sistem penyuluhan di Kabupaten Kubu Raya, yang

menjadi arah kebijakan pembangunan pertanian pada tahun anggaran 2024.

1.3.2. Tujuan

Rencana kerja tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2024 ada 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan untuk tahun anggaran 2024.
2. Menjadi sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024.
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renjaprovinci/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan

Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2024

SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun $n-1$), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun- tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan

Pokok- pokok materi yang disajikan :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran di rencanakan.
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; Renstra SKPD;

- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing- masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

- a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional /

- internasional, seperti SPM dan MDGs;
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD;
 - e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya; terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

- a. Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya : (1) pencapaian visi dan misi kepala daerah (2) pencapaian MDGs (3) pengentasan kemiskinan (4) pencapaian SPM (5) pendayagunaan potensi ekonomi daerah (6) pengembangan daerah terisolir.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan meliputi: (1) jumlah program dan jumlah kegiatan (2) sifat penyebaran lokasi program dan (3) total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.
- d. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB 2. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Tabel 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan sd Tahun Berjalan n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10 / 4
2.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2.09.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan									
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	100	100%	100	300	300%
2.09.01.2.01	Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	300	300%
2.09.01.2.01.01	Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	4	4	100%	4	12	300%
2.09.01.2.01.06	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	2	2	100%	2	6	300%
2.09.01.2.01.07	Sub Keg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	2	2	100%	2	6	300%
2.09.01.2.02	Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100%	100	300	300%
2.09.01.2.02.01	Sub Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	123	123	123	123	100%	123	369	300%
2.09.01.2.02.04	Sub Keg Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4	4	4	4	100%	4	12	300%
2.09.01.2.02.05	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	1	100%	1	3	300%

2.09.01.2.02.07	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	4	4	100%	4	12	300%
2.09.01.2.05	Keg Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100%	100	300	300%
2.09.01.2.05.02	Sub Keg Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	174	174	174	174	100%	174	522	300%
2.09.01.2.05.09	Sub Keg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10	10	10	100%	10	30	300%
2.09.01.2.05.10	Sub Keg Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	50	50	50	100%	50	150	300%
2.09.01.2.05.11	Sub Keg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	15	15	15	15	100%	15	45	300%
2.09.01.2.06	Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100%	100	300	300%
2.09.01.2.06.01	Sub Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.09.01.2.06.04	Sub Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.09.01.2.06.05	Sub Keg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.09.01.2.06.06	Sub Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.09.01.2.06.09	Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.09.01.2.07.	Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100	100	100	100	100%	100	300	300%
2.09.01.2.07.	Sub Keg Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	2	2	2	100%	2	6	300%
2.09.01.2.07.05	Sub Keg Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	10	10	10	100%	10	30	300%
2.09.01.2.07.	Sub Keg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.09.01.2.07.	Sub Keg Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.09.01.2.07.10.	Sub Keg Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.09.01.2.08	Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	100	100%	100	300	300%
2.09.01.2.08.02	Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.09.01.2.08.03	Sub Keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.09.01.2.08.04	Sub Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	1	100%	1	3	300%

2.09.01.2.09	Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100	100	100	100	100%	100	300	300%
2.09.01.2.09.02	Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	88	88	88	88	100%	88	264	300%
2.09.01.2.09.10	Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	10	10	10	100%	10	30	300%
2.09.01.2.09.	Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	10	10	10	100%	10	30	300%
3.	Urusan Pemerintahan Pilihan									
3.07.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan									
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	3,50	3	3	3	100%	3	9	257%
3.27.02.2.01	Keg Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Laporan)	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3	300%
3.27.02.2.01.01	Sub Keg Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
3.27.02.2.01.02	Sub Keg Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
3.27.02.2.02	Keg Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota (Laporan)	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3	300%
3.27.02.2.02.01	Sub Keg Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (VUB)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
3.27.02.2.02.02	Sub Keg Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
3.27.02.2.02.03	Sub Keg Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Daya dukung prasarana pertanian terhadap produktivitas pertanian (%)	100	100	100	100	100%	100	300	300%
3.27.03.2.01	Keg Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian (Laporan)	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3	300%
3.27.03.2.01.02	Sub Keg Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
3.27.03.2.01.03	Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
3.27.03.2.02	Keg Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Pembangunan Prasarana Pertanian (Laporan)	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3	300%
3.27.03.2.02.01	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara (Unit)	9	9	9	9	100%	9	27	300%
3.27.03.2.02.02	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	9	9	9	9	100%	9	27	300%
3.27.03.2.02.03	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	9	9	9	9	100%	9	27	300%

3.27.03.2.02.04	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	9	9	9	9	100%	9	27	300%
3.27.03.2.02.05	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	9	9	9	9	100%	9	27	300%
3.27.03.2.02.06	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	9	9	9	9	100%	9	27	300%
3.27.03.2.02.08	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	9	9	9	9	100%	9	27	300%
3.27.03.2.02.09	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	9	9	9	9	100%	9	27	300%
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Perlindungan Pertanian (%)	100	100	100	100	100%	100	300	300%
3.27.05.2.01	Keg Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (Laporan)	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3	300%
3.27.05.2.01.01	Sub Keg Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	200	200	200	200	100%	200	600	300%
3.27.05.2.01.02	Sub Keg Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	30	30	30	30	100%	30	90	300%
3.27.05.2.01.03	Sub Keg Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	30	30	30	30	100%	30	90	300%
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Pertanian Yang Dibina	100	100	100	100	100%	100	300	300%
3.27.07.2.01	Keg Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Laporan)	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3	300%
3.27.07.2.01.01	Sub Keg Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2	2	2	2	100%	2	6	300%
3.27.07.2.01.02	Sub Keg Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2	2	2	2	100%	2	6	300%
3.27.07.2.01.03	Sub Keg Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	2	2	2	2	100%	2	6	300%
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Indeks Ketersediaan Pangan Kabupaten (Poin)	75	54	54	54	100%	54	162	216%
2.09.02.2.01	Keg Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3	300%
2.09.02.2.01.01	Sub Keg Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia(Unit)	2	2	2	2	100%	2	6	300%
2.09.02.2.01.03	Sub Keg Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia(Unit)	2	2	2	2	100%	2	6	300%
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH (Poin)	95	80	80	80	100%	80	240	253%
2.09.03.2.01	Keg Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Laporan)	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3	300%

2.09.03.2.01.01	Sub Keg Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan(Laporan)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.09.03.2.01.02	Sub Keg Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia(Laporan)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.09.03.2.01.04	Sub Keg Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan(Dokumen)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.09.03.2.01.05	Sub Keg Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan(Unit)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.09.03.2.01.06	Sub Keg Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan(Unit)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.09.03.2.02.	Keg Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3	300%
2.09.03.2.02.01.	Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota(Laporan)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.09.03.2.04	Keg Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (Laporan)	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3	300%
2.09.03.2.04.02	Sub Keg Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal(Laporan)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.09.03.2.04.03	Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun(Laporan)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tingkat Kerawanan Pangan (Poin)	25	25	25	25	100%	25	75	300%
2.09.04.2.01	Keg Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Laporan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan (Laporan)	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3	300%
2.09.04.2.01.01	Sub Keg Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan(Dokumen)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.09.04.2.02	Keg Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3	300%
2.09.04.2.02.01	Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota(Laporan)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.09.04.2.02.02	Sub Keg Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota(Dokumen)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Kasus Pangan Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Yang Telah Ditetapkan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	100,00	300	300%
2.09.05.2.01	Keg Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3	300%
2.09.05.2.01.	Sub Keg Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina(Dokumen)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.09.05.2.01.04	Sub Keg Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota(Dokumen)	1	1	1	1	100%	1	3	300%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya diukur melalui Indikator Kinerja Umum (IKU). IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ada 2 indikator yaitu: (1) Nilai SAKIP SKPD dan (2) PDRB Sektor Pertanian.

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Tujuan	SPM / Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Urusan Penunjang Pemerintahan											
	Nilai SAKIP Kabupaten	tidak ada	-	B	B	BB	BB	B	B	BB	BB	
				-64,5	-68	-71,5	-71,5	-64,5	-68	-71,5	-71,5	
	-		Nilai SAKIP SKPD	62	64	66	66	62	64	66	66	
2	Urusan Bidang Pangan											
	Pertumbuhan PDRB	tidak ada	-	4,99	6,07	6,59	6,59	4,99	6,07	6,59	6,59	
	-		PDRB Sektor Pertanian	1.300.000	1.310.000	1.320.000	1.320.000	1.300.000	1.310.000	1.320.000	1.320.000	
3	Urusan Bidang Pertanian											
	Pertumbuhan PDRB	tidak ada	-	4,99	6,07	6,59	6,59	4,99	6,07	6,59	6,59	
	-		PDRB Sektor Pertanian	1.300.000	1.310.000	1.320.000	1.320.000	1.300.000	1.310.000	1.320.000	1.320.000	

2.2.2. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Penyebab Capaian Kinerja Tidak Terpenuhi

1. Alih fungsi lahan pertanian produktif

Dewasa ini, keberlanjutan sektor pertanian–tanaman pangan tengah dihadapkan pada ancaman serius, yakni luas lahan pertanian yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif. Kini lahan sawah lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai real estate, pabrik, atau infrastruktur untuk aktivitas industri lainnya daripada ditanami tanaman pangan.

Upaya pengendalian terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian tanaman pangan secara efektif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan Peraturan Pemerintah pendukungnya. Namun pada kenyataannya konversi lahan pertanian ke perumahan dan industri terus berlangsung. Hal ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi keberlanjutan produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan.

2. Rendahnya produksi tanaman pangan

Produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Kubu Raya khususnya padi masih sangat rendah. Produktivitas padi rata-rata 3,4 ton per hektar padahal di Pulau Jawa dapat mencapai 6 ton per hektar (hanya 50% dari produktivitas di Pulau Jawa). Berdasarkan diagram batang tersebut, tampak bahwa produksi padi di Kabupaten Kubu Raya mengalami fluktuasi akibat beberapa hal seperti sarana produksi pertanian, sumber daya manusia, anggaran, dan kondisi cuaca.

3. Rendahnya akses petani terhadap teknik budidaya

Dari sisi sumberdaya manusia, masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian, karena mereka yang

berpendidikan rendah pada umumnya adalah petani yang tinggal di daerah pedesaan. Kondisi ini juga semakin diperparah dengan kurangnya pendampingan penyuluhan pertanian. Di sisi lain, bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan formal tingkat menengah dan tinggi, mereka kurang tertarik bekerja dan berusaha di pertanian, sehingga mengakibatkan tingginya urbanisasi ke perkotaan. Kondisi ini dapat ditekan dengan mengembangkan agroindustri pertanian di pedesaan, karena akan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan peluang usaha agroindustri di pedesaan. Agroindustri di desa ini memegang peran penting dalam proses produksi seperti penyediaan dan distribusi sarana produksi, usaha jasa pelayanan alat dan mesin pertanian.

4. Kurang maksimalnya kelembagaan penyuluh

Pendekatan kelembagaan telah menjadi strategi penting dalam pembangunan pertanian. Pengembangan kelembagaan pertanian baik formal maupun informal belum memberikan peran berarti di perdesaan. Hal ini disebabkan oleh peran antar lembaga pendidikan dan pelatihan, Balai Penelitian dan Penyuluhan (BPP) belum terkoordinasi dengan baik. Fungsi dan keberadaan lembaga penyuluhan cenderung terabaikan. Koordinasi dan kinerja lembaga keuangan perbankan perdesaan masih rendah. Koperasi perdesaan yang bergerak di sektor pertanian masih belum berjalan optimum. Keberadaan lembaga-lembaga tradisional di perdesaan belum dimanfaatkan secara optimal.

5. Rendahnya produksi hortikultura

Upaya pengembangan buah-buahan lokal memerlukan perhatian dan keseriusan dari berbagai pihak pemangku kepentingan, mulai dari pihak perencana dan pembuat kebijakan hingga pelaksana di lapangan, juga menyangkut peran serta masyarakat sebagai konsumen buah-buahan. Rendahnya produksi juga menyangkut berbagai aspek mulai dari produksi (on

farm dan off farm), distribusi hingga konsumsi, antara lain sebagai berikut: (1) program-program pemerintah yang terkait dengan pengembangan buah-buahan, (2) perlu dikembangkan varietas buah lokal, (3) terkait dengan skala teknis diperlukan komitmen pemerintah.

6. Belum maksimalnya peningkatan nilai tambah hasil pertanian

Nilai tambah produk pertanian kurang maksimal sehingga petani kurang dapat menikmati keuntungan dari hasil pertanian. Petani banyak yang menjual produk pertanian tanpa olah terlebih dahulu seperti menjual gabah kering giling dan gabah kering panen. Keuntungan dapat dimaksimalkan dengan memberikan intervensi pada pengolahan hasil pertanian seperti mendorong petani untuk menjual beras.

7. Belum maksimalnya peran pasar pertanian

Untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan, merupakan tantangan besar, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan yang cukup, penyebab utamanya adalah kemiskinan. Sebagian besar penduduk miskin adalah petani di perdesaan yang berperan sebagai produsen dan sekaligus sebagai konsumen. Selain itu, Indonesia sebagai negara kepulauan, yang jarak antar wilayah membutuhkan alat/sarana yang cukup dalam kelancaran distribusi pangan.

Masalah yang dijumpai dalam mendukung kelancaran distribusi dan akses pangan adalah : (1) infrastruktur distribusi, (2) sarana dan prasarana pasca panen, (3) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (4) sistem informasi pasar, (5) keterbatasan lembaga pemasaran daerah, (6) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (7)

kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (8) adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana.

Peluang Pengembangan Pelayanan dapat dilakukan dengan beberapa cara: (1) Memperluas dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian, (2) Meningkatkan produktivitas lahan, (3) Meningkatkan produksi di sentra pertanian, (4) Meningkatkan peran PPL, (5) Memberdayakan peran kelompok tani, (6) Meningkatkan produksi hortikultura, (7) Memaksimalkan nilai tambah hasil pertanian, (8) Memaksimalkan pemasaran hasil pertanian

2.2.3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Indikator	Target	Real	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100,00	13.760.062.827	13.158.243.323	95,63	4,37
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Indeks ketersediaan pangan kabupaten (Poin)	70	52,19	74,56	3.000.000.000	2.954.001.000	98,47	-23,91
3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (%)	92,5	74,63	80,68	429.366.466	424.886.031	98,96	-18,28

Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2024

4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tingkat Kerawanan Pangan (Poin)	30	30,32	101,07	84.698.410	84.698.410	100,00	1,07
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase kasus pangan yang tidak sesuai standar mutu yang telah ditetapkan (%)	100	100	100,00	14.999.961	14.999.961	100,00	0,00
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Daya dukung prasarana pertanian terhadap produktivitas pertanian (%)	100	100	100,00	1.932.457.906	1.839.738.273	95,20	4,80
7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	2,5	2,9	116,00	2.471.366.870	1.674.491.613	67,76	48,24
8	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Perlindungan Pertanian (%)	100	100	100,00	656.848.570	651.411.170	99,17	0,83
9	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Pertanian yang Dibina (%)	100	100	100,00	3.938.393.514	1.908.291.228	48,45	51,55
	Jumlah		695	660,04	94,97	26.288.194.524	22.710.761.009	86,39	8,58

2.2.4. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk melakukan analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maka digunakan analisis SWOT. Melalui Analisis SWOT maka akan dapat diketahui strategi kebijakan pembangunan pertanian di Kabupaten Kubu Raya.

Untuk mengetahui strategi pembangunan pertanian di Kabupaten Kubu Raya dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Analisis ini dilakukan dengan menerapkan kriteria kesesuaian dengan data kuantitatif dan deskripsi. Pembobotan dan scoring dalam analisis SWOT ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara tersebut yang kemudian dijustifikasi dalam bentuk bobot dan skor. Menurut Rangkuti (2004) ada beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis SWOT, yaitu sebagai berikut.

1. Tahap pengumpulan data.

Tahap ini merupakan suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra analisis. Pada tahap ini data dibedakan menjadi dua, yaitu data eksternal dan data internal. Data eksternal berasal dari lingkungan luar (peluang dan ancaman), sedangkan data internal berasal dari dalam (kekuatan dan kelemahan). Tahap ini menggunakan dua model matriks faktor strategi internal. Adapun matriks faktor strategi internal disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Pada kolom satu disusun kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan.
- b) Pada kolom dua diberi bobot terhadap masing-masing faktor, mulai dari 1,0 (paling penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting), jumlah bobot untuk semua faktor kekuatan dan kelemahan sama dengan 1,0.

- c) Nilai bobot diperoleh dari rata-rata masing-masing pertanyaan dibagi dengan total rata-rata pertanyaan yang diberikan oleh responden.
- d) Pada kolom tiga diberi skala rating mulai dari 4 (Outstanding) sampai dengan 1 (Poor), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi pengembangan pengembangan pertanian di Kabupaten Kubu Raya. Pemberian nilai rating untuk kekuatan bersifat positif (nilai 4 = Sangat besar, 3 = Besar, 2 = Sedang, dan 1 = Kecil), sedangkan pemberian nilai rating untuk kelemahan bersifat negative (4 = Kecil, 3 = Sedang, 2 = Besar, dan 1 = Sangat Besar). d) Masing-masing besaran rating merupakan rata-rata dari penilaian yang diberikan oleh responden;
- e) Pada kolom empat diisi nilai hasil perkalian bobot dan rating suatu faktor yang sama. Nilai hasil kali tersebut merupakan skor pembobotan dari faktor tersebut.
- f) Pada kolom lima diberi komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.
- g) Menjumlahkan skor pembobotan pada kolom empat.

Matriks faktor strategi eksternal disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Pada kolom satu disusun peluang-peluang dan ancaman-ancaman.
- b) Selanjutnya pada kolom dua diberi bobot terhadap masing-masing faktor peluang dan ancaman, mulai dari 1,0 (sangat penting), sampai 0,0 (tidak penting). Jumlah bobot untuk semua faktor peluang dan ancaman sama dengan 1,0.
- c) Pada kolom tiga diberi skala rating mulai dari 4 sampai dengan 1, berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi pengembangan pertanian di Kabupaten Kubu Raya. Pemberian nilai rating untuk peluang bersifat positif (nilai 4 = sangat besar, 3

= besar, 2 = sedang, dan 1 = kecil), sedangkan pemberian nilai rating untuk ancaman bersifat negatif (nilai 4 = Kecil, 3 = sedang, 2 = besar, dan 1 = sangat besar).

- d) Pada kolom empat diisi nilai hasil perkalian bobot dan rating suatu faktor yang sama. Nilai hasil kali tersebut merupakan skor pembobotan dari faktor tersebut.
- e) Pada kolom lima diberi komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.
- f) Menjumlahkan skor pembobotan pada kolom empat. Nilai tersebut menunjukkan bagaimana sistem bereaksi terhadap faktor –faktor strategi eksternalnya.

2. Tahap Analisis Data.

Pada tahap ini, setelah semua informasi terkumpul, selanjutnya memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Analisis data yang digunakan adalah model analisis SWOT, dimana terdapat empat strategi yang dapat dihasilkan, yaitu strategi SO, WO, ST, dan WT.

3. Tahap Pengambilan Keputusan.

Pada tahap ini, mengkaji ulang dari empat strategi yang telah dirumuskan dalam tahap analisis. Setelah itu diambil keputusan dalam menentukan strategi yang paling menguntungkan, efektif dan efisien bagi organisasi berdasarkan Matriks SWOT dan pada akhirnya dapat disusun suatu rencana strategi yang akan dijadikan pegangan dalam melakukan kegiatan selanjutnya.

Tabel 4. Matriks Internal Faktor Analysis Strategy (IFAS)

No	Faktor	Bobot	Rating	Skor
KEKUATAN (S)				
1	Kebijakan Pemda	0,17	5,00	0,83
2	Sumber Daya Lahan	0,13	4,50	0,60
3	Hinterland Kota Pontianak	0,10	4,00	0,40
4	Sumber Daya Manusia	0,07	3,50	0,23
5	Kondisi Agroklimat	0,03	3,00	0,10
	Jumlah	0,50		2,17
KELEMAHAN (W)				
1	Sarana dan Prasarana Pertanian	0,17	2,50	0,42
2	Kelembagaan Pertanian	0,13	2,30	0,31
3	Akses Permodalan	0,10	2,00	0,20
4	Produktivitas dan Mutu Hasil Pertanian	0,07	1,90	0,13
5	Kerjasama antar Stakeholder	0,03	1,50	0,05
	Jumlah	0,50		1,10
	Total Faktor Internal	1,00		3,27

Sumber: Fungsional Perencana DKPP (2022).

Tabel 5. Matriks Eksternal Factor Analysis Strategy (EFAS).

No	Faktor	Bobot	Rating	Skor
PELUANG (O)				
1	Permintaan Beras	0,17	5,00	0,83
2	Optimalisasi Lahan Pertanian	0,13	4,50	0,60
3	Pemanfaatan Teknologi Pertanian	0,10	4,00	0,40

4	Pembiayaan Berbagai Sektor	0,07	3,50	0,23
5	Kebijakan Otonomi Daerah	0,03	3,00	0,10
	Jumlah	0,50		2,17
ANCAMAN (T)				
1	Penurunan Minat Tenaga Kerja Pertanian	0,17	1,00	0,17
2	Tingkat Kesejahteraan Petani Masih Rendah	0,13	1,20	0,16
3	Alih Fungsi Lahan Pertanian	0,10	2,00	0,20
4	Globalisasi dan Pasar Bebas	0,07	2,50	0,17
5	Perubahan Iklim	0,03	2,90	0,10
	Jumlah	0,50		0,79
	Total Faktor Eksternal	1,00		2,96

Sumber: Fungsional Perencana DKPP

Berdasarkan penilaian IFAS (Internal Faktor Analisis System) dan EFAS (Eksternal Faktor Analisis System) yang dilakukan pada strategi pengembangan pertanian di Kabupaten Kubu Raya, dihasilkan nilai total rata-rata IFAS sebesar 3,27 dengan skor kekuatan sebesar 2,17 atau (66.33 %) dan nilai kelemahan sebesar 1,10 atau (33.67%). Nilai total rata-rata EFAS sebesar 2.96 dari nilai peluang sebesar 2,17 atau (73.28 %) dan nilai ancaman sebesar 0.79 (26.72%).

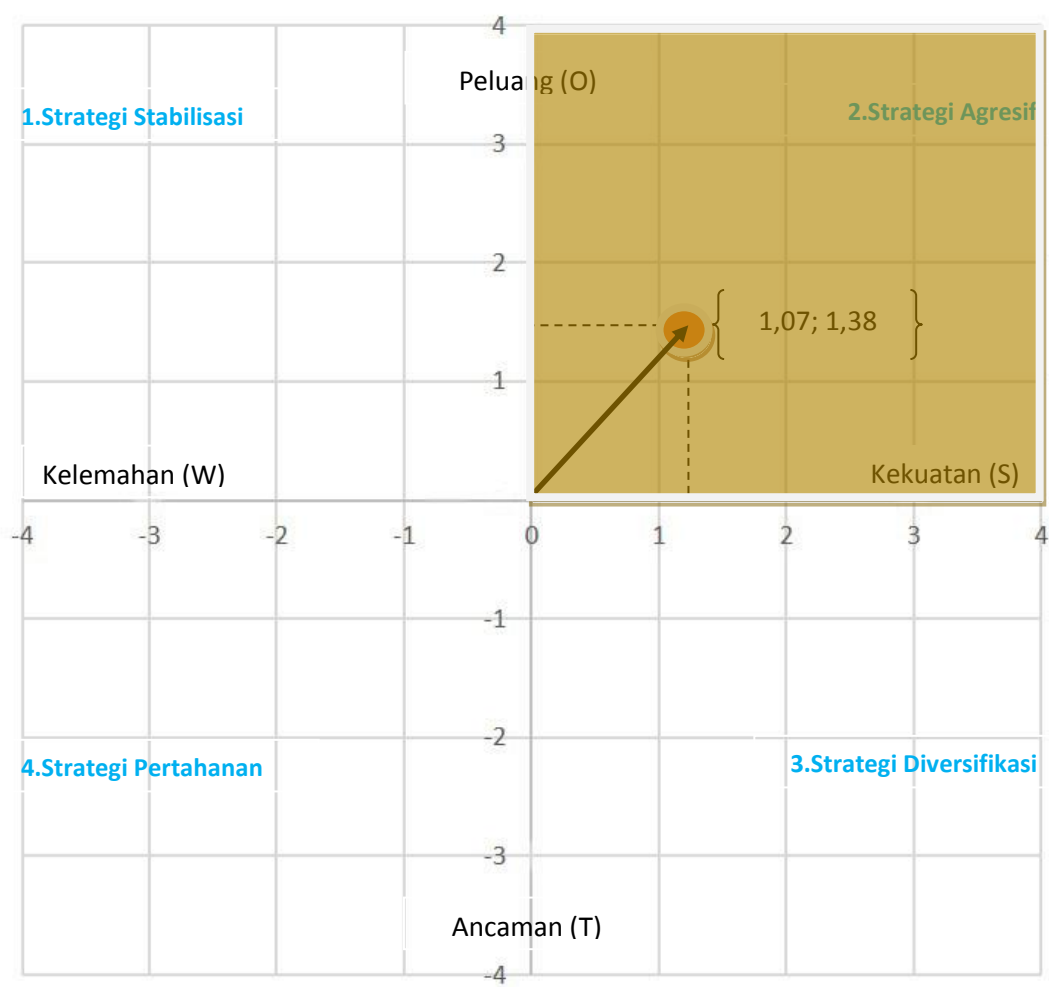
Untuk mengetahui pengembangan pertanian di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan penilaian faktor internal dan eksternal, maka dilakukan pengurangan antara jumlah kekuatan dan kelemahan pada sumbu (X), dan pengurangan antara jumlah peluang dan ancaman untuk sumbu (Y) maka nilai.

$$\begin{aligned} X = (S-W) &= 2,17 - 1,10 = 1.07 \\ Y = (O-T) &= 1,75 - 1,29 = 1.38 \end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh angka pada kedua sumbu (X dan Y = 1.07 dan 1.38 yang bernilai positif terhadap pengembangan pertanian di Kabupaten Kubu Raya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Hasil analisis data pada diagram SWOT diperoleh koordinat 1.07;1.38 yang mana koordinat ini berada pada kuadrat 1 yaitu strategi agresif. Strategi ini menunjukan situasi yang sangat menguntungkan. Pengembangan pertanian di Kabupaten Kubu Raya memiliki kekuatan dan peluang yang sifatnya menyatu dan saling mendukung, yaitu dengan cara menggunakan faktor semua kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya menyusun 11 (sebelas) strategi sebagai berikut. Pertama, peningkatan produksi tanaman pangan. Kedua, peningkatan produksi peternakan. Ketiga, peningkatan produksi hortikultura. Keempat, peningkatan swasembada daging. Kelima, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian. Keenam, pemberdayaan penyuluh pertanian. Ketujuh, peningkatan ketahanan pangan. Kedelapan, pencegahan penyakit menular. Kesembilan, perlindungan tanaman dari gangguan OPT. Kesepuluh, sistem informasi / database pertanian. Kesebelas, peningkatan pemasaran hasil pertanian. Keduabelas, peningkatan kesejahteraan petani.

Gambar 1. Analisis Diagram SWOT Strategi Pembangunan Pertanian



Sumber: Fungsional Perencana DKPP

Tabel 6. Penentuan Strategi Pembangunan Pertanian

		Kekuatan (S)		Kelemahan (W)	
		1	Kebijakan Pemda	1	Sarana dan Prasarana Pertanian
		2	Sumber daya lahan dan petani	2	Jumlah petugas yang terbatas.
		3	Hinterland Kota Pontianak	3	Akses Permodalan
		4	Jumlah Poktan Cukup Banyak	4	Produktivitas dan Mutu Hasil Pertanian
		5	Teknologi Pertanian	5	Kerjasama antar Stakeholder
Peluang (O)		Strategi S-O		Strategi W-O	
1	Permintaan produk pertanian	1	Menyusun kebijakan pemda yang dapat meningkatkan produksi dan diversifikasi hasil pertanian.	1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan produksi beras.
2	Optimalisasi lahan pertanian	2	Melindungi lahan pertanian dengan melakukan optimalisasi lahan pertanian pada kawasan pertanian khusus.	2	Melaksanakan optimalisasi lahan pertanian melalui sistem kawasan sehingga mempermudah jangkauan petugas.
3	Daerah hinterland banyak produksi pertanian	3	Memaksimalkan daerah hinterland Kota Pontianak untuk produksi pertanian dengan komoditi yang cukup menguntungkan.	3	Memfasilitasi petani dalam mendapatkan kredit lunak untuk menjalankan usaha budidaya sehingga dapat melakukan suplai produk pertanian.
4	Pembiayaan berbagai sektor	4	Melaksanakan pembinaan dan penguatan Poktan melalui berbagai sumber pembiayaan	4	Meningkatkan produktivitas dan mutu hasil pertanian melalui pembiayaan dari berbagai sektor.
5	Agroklimat	5	Memanfaatkan teknologi pertanian untuk menciptakan agroklimat yang optimal.	5	Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terutama BPTP dan BMKG untuk menciptakan agroklimat yang sesuai bagi tanaman pertanian.
Ancaman (T)		Strategi S-T		Strategi W-T	
1	Kemiskinan dan kerawanan pangan	1	Membuat kebijakan yang berpihak untuk menurunkan angka kemiskinan dan mencegah kerawanan pangan.	1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertanian untuk menurunkan tingkat kerawanan pangan dan kemandirian pangan.
2	Biaya produksi yang masih tinggi	2	Menciptakan konsep kawasan sehingga mempermudah pengawalan oleh PPL dan dapat menerapkan mekanisasi pertanian secara efektif dan efisien.	2	Menciptakan sistem penyuluhan yang efektif dan efisien sehingga dapat mengawal petani dalam menekan biaya produksi pertanian.
3	Alih Fungsi Lahan Pertanian	3	Melindungi dan mempertahankan kawasan pertanian di daerah hinterland sehingga laju alih fungsi lahan pertanian dapat dicegah atau diperlambat.	3	Mempermudah akses permodalan petani yang mau mendukung LP2B sehingga dapat mencegah alih fungsi lahan pertanian
4	Globalisasi dan Pasar Bebas	4	Mengedukasi Poktan untuk dapat memproduksi maksimal, efektif dan efisien	4	Meningkatkan peran PMHP dalam pengawasan keamanan pangan sehingga

			sehingga dapat bersaing dalam globalisasi dan pasar bebas.		produk pertanian dapat bersaing dalam era pasar bebas.
5	Perubahan iklim, penyakit tanaman dan ternak	5	Memanfaatkan teknologi pertanian dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim.	5	Meningkatkan komunikasi antar stakeholder agar dapat melakukan pengendalian dan penanggulangan dampak perubahan iklim, penyakit tanaman dan pengendalian kesehatan ternak.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

- a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs;
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD;
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Permasalahan Pembangunan periode 2019-2024 pada dasarnya merupakan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya. Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan, diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode pembangunan jangka waktu lima tahun ke depan.

Godet (1994) dan Godet et al (1999) memperkenalkan teknik MICMAC untuk melakukan analisis skenario pembangunan. Pendekatan MICMAC mengandalkan pemikiran analitis melalui pemecahan yang sistematis terhadap suatu masalah. Oleh sebab itu, MICMAC dimulai dengan perumusan masalah kemudian diikuti dengan identifikasi variabel internal dan eksternal. Untuk dapat

Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2024

memecahkan masalah pembangunan pertanian maka harus dilakukan identifikasi variabel internal dan eksternal yang kemungkinan memiliki pengaruh. Berdasarkan kajian terhadap beberapa jurnal/penelitian maka didapatkan beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja pertanian antara lain sebagai berikut:

Tabel 7. Variabel Yang Diduga Mempengaruhi Kinerja Pertanian

No	Judul Penelitian	Deskripsi Penelitian	Variabel Yang Berpengaruh
1	Prospek Lahan Rawa Pasang Surut Untuk Tanaman Padi	Muhammad Alwi. Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, Banjarbaru, Kalsel. 2014. Prosiding Seminar Nasional "Inovasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi".	(1) Kesuburan Tanah; (2) Sistem Irigasi; (3) Transportasi; (4) Tingkat Pendidikan; (5) Indeks Penanaman; (6) Organisme Pengganggu Tanaman
2	Peningkatan Produktivitas Padi Melalui Perbaikan Sistem Produksi di Lahan Pasang Surut Sumatera Selatan.	Imelda S. Marpaung; Tumarlan Thamrin; Yanter Hutapea. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan. 2016. Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal 2016.	(1) Teknologi Pra Panen; (2) Teknologi Pemanenan; (3) Teknologi Pasca Panen
3	Pengaruh Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Produksi Padi di Kabupaten Gowa Propinsi Sulsel.	Aminuddin. Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia Makassar. 2009. Journal Of Indonesian Applied Economics.	(1) Luas Lahan
4	Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Produksi Padi di Lahan Tadah Hujan.	Woro Estiningtyas dan Muhammad Syakir. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pertanian Cimanggu	(1) Curah Hujan

		Bogor. 2017.	
5	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Usaha Tani Padi Sawah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sorolangun.	Muhajirin; Yusma Damayanti; Elwamendri. Fakultas Pertanian Universitas Jambi. 2014. Sosio Ekonomika Bisnis.	(1) Benih; (2) Pupuk; (3) Obat
6	Analisis Risiko Usahatani Padi Pada Lahan Pasang Surut di Kabupaten Pontianak.	Muhammad Zakirin; Erlinda Yurisinthae; Novira Kursin. Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Pontianak. 2013. Jurnal Social Economic of Agriculture.	(1) Tenaga Kerja; (2) Umur Petani
7	Analisis Keterkaitan Produktivitas Pertanian dan Impor Beras di Indonesia	Headhi Berlina Siringo dan Murni Daulay. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.	(1) Produktivitas
8	Peran Kelembagaan Kelompok Tani Terhadap Produksi dan Pendapatan Petani Ganyong di Desa Sindanglaya Kec Sukamantri Kab Ciamis Jawa Barat.	Devy Septian. 2010. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Bogor.	(1) Kelompok Tani
9	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Padi di Indonesia Tahun 2009-2013.	Reata Lupja Roma Dona. Tanpa Tahun. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.	(1) Harga Pembelian Gabah
10	Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani	Yudi Pranata. 2018. Fakultas Pertanian Universitas Lampung.	(1) Pendapatan Petani

	Lada di Kec Tanjung Raja Kab Lampung Utara.	Skripsi.	
11	Pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) Petani Terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah	Alfan Bachtiar Harahap; Rahmanta Ginting; Hasman Hasyim. Tanpa Tahun. Fakultas Pertanian USU.	(1) Sistem Penyuluhan
12	Pengaruh Pemberian Kapur dan Kompos Sisa Tanaman Terhadap Aluminium Dapat Ditukar dan Produksi Tanaman Kedelai Pada Tanah Vertic Hapludult dari Gajrug, Banten.	U.M. Wahjudin. 2006. Buletin Agron. Fakultas Pertanian IPB Bogor.	(1) Kapur
13	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petani Dalam Penjualan Padi Ke Tengkulak di kec Jatilawang Kab Banyumas.	Hermanto Hutabarat. 2013. Buletin Agritech. Akademi Pertanian HKTI Banyumas.	(1) Konsumsi Keluarga; (2) Pengeluaran Petani
14	Akar Penyebab Kemiskinan Petani Hortikultura di Kab Tanggamus, Propinsi Lampung.	Tubagus Hasanuddin; Dame Trully G; Teguh Endaryanto. 2009. Jurnal Agrikultura. Fakultas Pertanian Universitas Lampung.	(1) Tengkulak; (2) Kualitas SDM

Sumber: Renstra DKPP Tahun 2019-2024

Variabel-variabel tersebut dilakukan analisis menggunakan pendekatan MICMAC. MICMAC merupakan singkatan dari Matrix Of Cross Impact Multiplications Applied to a Classification. Untuk mengetahui hubungan antar variabel maka dilakukan pembobotan

menggunakan MDI (Matrix of Direct Influence) seperti gambar berikut.

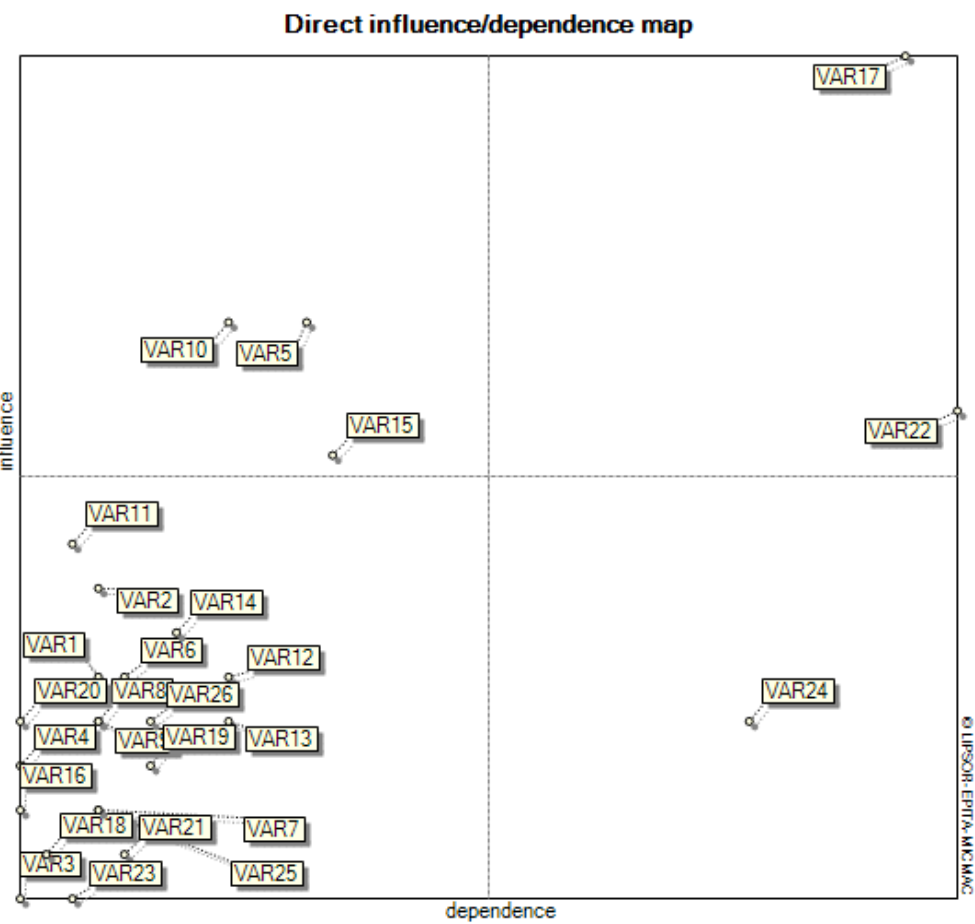
Gambar 2. Matrik Hubungan Langsung

	26 : VAR26	25 : VAR25	24 : VAR24	23 : VAR23	22 : VAR22	21 : VAR21	20 : VAR20	19 : VAR19	18 : VAR18	17 : VAR17	16 : VAR16	15 : VAR15	14 : VAR14	13 : VAR13	12 : VAR12	11 : VAR11	10 : VAR10	9 : VAR9	8 : VAR8	7 : VAR7	6 : VAR6	5 : VAR5	4 : VAR4	3 : VAR3	2 : VAR2	1 : VAR1
1 : VAR1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 : VAR2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 : VAR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 : VAR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5 : VAR5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 : VAR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0
7 : VAR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
8 : VAR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
9 : VAR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
10 : VAR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
11 : VAR11	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
12 : VAR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0
13 : VAR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0
14 : VAR14	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0
15 : VAR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 : VAR16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 : VAR17	2	1	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 : VAR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
19 : VAR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0
20 : VAR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
21 : VAR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
22 : VAR22	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0
23 : VAR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
24 : VAR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
25 : VAR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
26 : VAR26	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

© LIPSOR-EPTA-MICMAC

Sumber: Hasil Analisis Menggunakan Software MICMAC

Gambar 3. Peta Variabel Menurut Pengaruh dan Ketergantungan

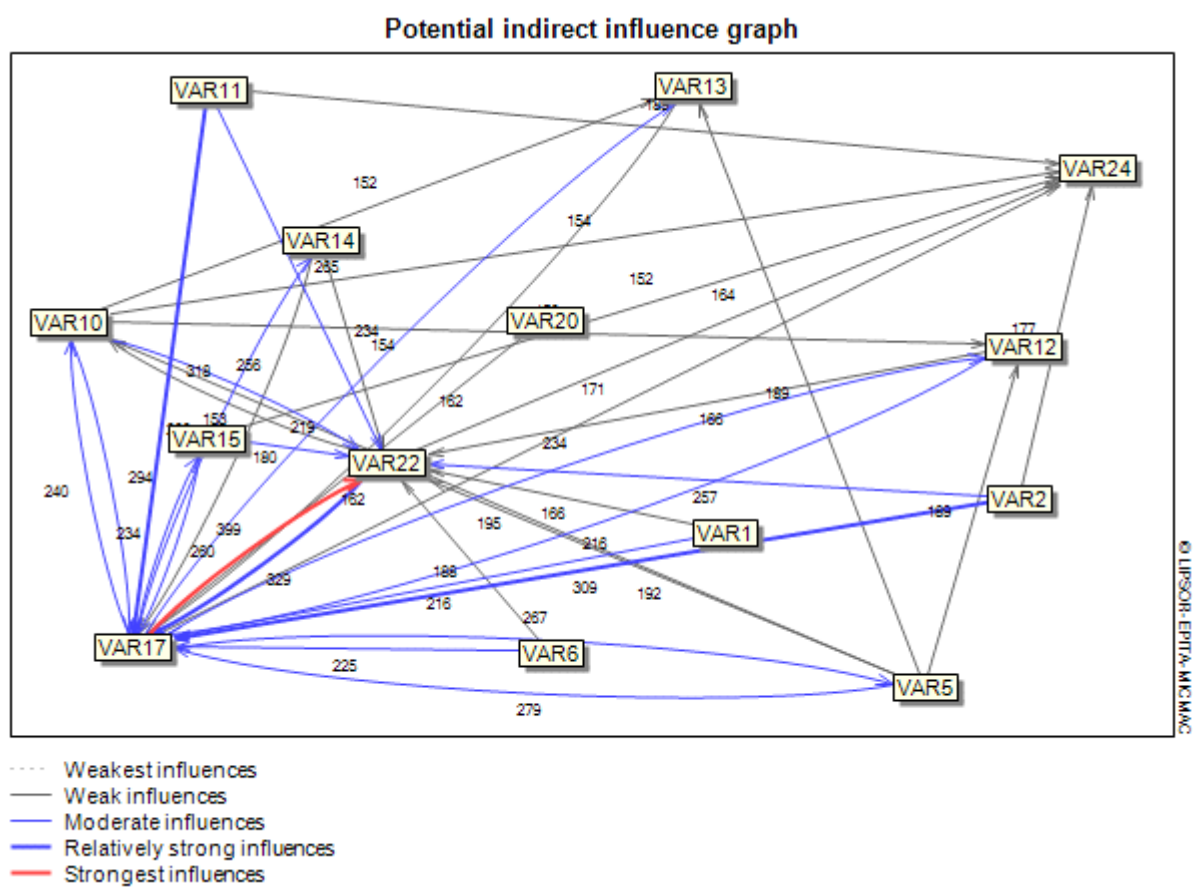


Sumber: Hasil Analisis Menggunakan Software MICMAC

Menurut Fauzi (2019), yang dimaksud variabel strategis adalah variabel yang terdapat dalam Kuadran I (Vari5 = Indeks Penanaman, Var10=Luas Lahan dan Variabel 15=Tenaga Kerja) karena variabel tersebut memiliki pengaruh paling besar dan ketergantungan yang sangat kecil. Sementara di Kuadran II terdapat variabel V17=Produktivitas dan V22=Pendapatan Petani. Untuk melakukan perubahan besar terhadap Produktivitas dan Pendapatan Petani memerlukan perubahan besar terhadap banyak variabel yang mempengaruhi kedua faktor tersebut. Produktivitas dipengaruhi oleh: Var1=Kesuburan Tanah, Var2=Sistem Irigasi, Var5=Indeks Penanaman, Var6=Organisme Penganggu Tanaman, Var10=Luas

Lahan, Var11=Curah Hujan, Var12=Benih, Var13=Pupuk, Var14=Obat, Var15=Tenaga Kerja, Var16=Umur Petani, Var20=Kapur, dan Var22=Pendapatan Petani. Pendapatan Petani juga dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain: Var1=Kesuburan Tanah; Var2=Sistem Irigasi, Var6=Organisme Pengganggu Tanaman, Var7=Teknologi Pra Panen, Var8=Teknologi Pemanenan, Var9=Teknologi Pasca Panen, Var10=Luas Lahan, Var11=Curah Hujan, Var12=Benih, Var13=Pupuk, Var14=Obat, Var15=Tenaga Kerja, Var16=Umur Petani, Var17=Produktivitas Petani, Var18=Kelompok Tani, Var19=Harga Gabah, Var20=Kapur, dan Var25=Tengkulak.

Gambar 4. Grafik Hubungan Tidak Langsung Antar Variabel



Berdasarkan hasil analisis pohon masalah terhadap pembangunan pertanian tanaman pangan yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2019-2024, terbagi menjadi dua aspek.

Pertama, masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian. Kendala utama pengembangan pertanian ke depan adalah rendahnya produktivitas pertanian. Salah satu faktor penting adalah ketersediaan lahan pertanian. Kecenderungan penurunan luas lahan pertanian semakin meningkat seiring dengan pengembangan perkebunan sawit dan pembangunan perumahan di Kabupaten Kubu Raya. Kondisi tersebut berdampak langsung pada penurunan produksi komoditas pertanian di Kabupaten Kubu Raya.

Kedua, masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani. Sasaran dari peningkatan kesejahteraan petani adalah meningkatnya pendapatan petani, meskipun peningkatan pendapatan petani tidak secara langsung mencerminkan peningkatan kesejahteraan karena tergantung pula dari tingkat pengeluaran dan faktor-faktor non finansial (sosial). Namun pendapatan petani merupakan indikator yang secara langsung terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian, sehingga indikator dari sasaran peningkatan kesejahteraan petani adalah besaran pendapatan rumah tangga petani.

Kesejahteraan petani merupakan permasalahan multidimensi artinya penanganannya akan melibatkan banyak stakeholder sehingga dalam analisis pohon masalah tidak menjadi akar permasalahan di sektor pertanian. Akar permasalahan yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah produktivitas tanaman yang rendah. Diharapkan dengan meningkatkan produktivitas akan memberikan dampak lanjut terhadap penanganan kesejahteraan petani.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya; terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

Tabel 8. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				123.328.566.188	
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan					Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				123.328.566.188	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	KKR	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100.933.136.690	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	KKR	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	115.397.911.419	Sekretariat
4	Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKR	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	1.155.987.098	Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKR	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	1.389.607.365	
5	Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	651.863.095	Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	817.779.284	Rencana Kerja dan Keuangan
6	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KKR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	86.036.862	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KKR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	86.036.862	Rencana Kerja dan Keuangan
7	Sub Keg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	418.087.141	Sub Keg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	485.791.219	TU dan Kepegawaian
8	Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KKR	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	92.024.539.108	Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KKR	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	105.044.539.108	
9	Sub Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KKR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	123	91.174.388.874	Sub Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KKR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	123	104.174.388.874	TU dan Kepegawaian
10	Sub Keg Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	KKR	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4	704.797.379	Sub Keg Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	KKR	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4	704.797.379	Perlengkapan dan Umum
11	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKR	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	86.400.487	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKR	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	106.400.487	Rencana Kerja dan Keuangan
12	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	KKR	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	58.952.368	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	KKR	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	58.952.368	Rencana Kerja dan Keuangan
13	Keg Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KKR	Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100	645.481.192	Keg Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KKR	Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100	863.281.192	
14	Sub Keg Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KKR	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	174	0	Sub Keg Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KKR	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	174	0	TU dan Kepegawaian

15	Sub Keg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	KKR	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	171.625.361	Sub Keg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	KKR	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	346.625.361	TU dan Kepegawaian
16	Sub Keg Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	KKR	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	473.855.831	Sub Keg Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	KKR	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	516.655.831	TU dan Kepegawaian
17	Sub Keg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	KKR	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	15	0	Sub Keg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	KKR	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	15	0	TU dan Kepegawaian
18	Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah	KKR	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	2.121.821.394	Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah	KKR	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	2.335.355.074	
19	Sub Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KKR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	44.391.794	Sub Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KKR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	44.391.794	Perlengkapan dan Umum
20	Sub Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KKR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	280.402.819	Sub Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KKR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	317.245.699	Perlengkapan dan Umum
21	Sub Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KKR	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	142.232.112	Sub Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KKR	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	144.212.112	Perlengkapan dan Umum
22	Sub Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KKR	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	107.889.007	Sub Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KKR	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	123.888.007	Perlengkapan dan Umum
23	Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1.546.905.662	Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1.705.617.462	Perlengkapan dan Umum
24	Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KKR	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100	849.471.628	Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KKR	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100	849.471.628	
25	Sub Keg Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KKR	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	0	Sub Keg Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KKR	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	0	Perlengkapan dan Umum
26	Sub Keg Pengadaan Mebel	KKR	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	656.737.878	Sub Keg Pengadaan Mebel	KKR	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	656.737.878	Perlengkapan dan Umum
27	Sub Keg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KKR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	Sub Keg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KKR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	Perlengkapan dan Umum
28	Sub Keg Pengadaan Aset Tetap Lainnya	KKR	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	Sub Keg Pengadaan Aset Tetap Lainnya	KKR	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	Perlengkapan dan Umum
29	Sub Keg Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KKR	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	192.733.750	Sub Keg Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KKR	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	192.733.750	Perlengkapan dan Umum
30	Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KKR	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	1	3.434.276.403	Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKR	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	1	4.115.562.185	
31	Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KKR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	718.818.288	Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KKR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	832.818.288	Perlengkapan dan Umum
32	Sub Keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KKR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1.216.720.000	Sub Keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KKR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1.216.720.000	Perlengkapan dan Umum
33	Sub Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KKR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1.498.738.115	Sub Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KKR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	2.066.023.897	Perlengkapan dan Umum
34	Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKR	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)	100	701.559.867	Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKR	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)	88	800.094.867	
35	Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KKR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	88	573.839.777	Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KKR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	88	672.374.777	Perlengkapan dan Umum

36	Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KKR	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	127.720.090	Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KKR	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	127.720.090	Perlengkapan dan Umum
37	Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KKR	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	0	Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KKR	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	0	Perlengkapan dan Umum
38	Urusan Pemerintahan Pilihan					Urusan Pemerintahan Pilihan				87.980.318.634	
39	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				87.980.318.634	
40	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	KKR	Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	3,5	13.119.149.664	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	KKR	Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	3,5	20.544.098.434	Bidang PSP, Bidang TP, Bidang Horti, Bidang NAK
41	Keg Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	KKR	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Laporan)	1	3.755.791.539	Keg Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	KKR	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Laporan)	1	7.265.616.356	
42	Sub Keg Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	KKR	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	2.411.813.922	Sub Keg Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	KKR	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	5.393.280.360	Alsintan dan Pupus
43	Sub Keg Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	KKR	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1.343.977.617	Sub Keg Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	KKR	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1.872.335.996	P2HP TP
44	Keg Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	KKR	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota (Laporan)	1	9.363.388.125	Keg Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	KKR	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota (Laporan)	1	13.278.482.078	
45	Sub Keg Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	KKR	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemumian (VUB)	1	3.919.024.842	Sub Keg Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	KKR	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemumian (VUB)	1	6.855.224.265	Pembenihan dan Produksi Hortikultura
46	Sub Keg Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	KKR	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	4.610.787.866	Sub Keg Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	KKR	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	5.487.393.246	Pembenihan dan Produksi TP
47	Sub Keg Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	KKR	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	833.575.417	Sub Keg Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	KKR	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	935.864.567	Pembenihan dan Produksi TP
48	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	KKR	Daya dukung prasarana pertanian terhadap produktivitas pertanian (%)	100	29.677.208.978	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	KKR	Daya dukung prasarana pertanian terhadap produktivitas pertanian (%)	100	43.132.172.294	Bidang PSP, Bidang Horti, Bidang NAK
49	Keg Pengembangan Prasarana Pertanian	KKR	Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian (Laporan)	1	3.248.205.077	Keg Pengembangan Prasarana Pertanian	KKR	Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian (Laporan)	1	3.567.809.027	
50	Sub Keg Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	KKR	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1	995.598.762	Sub Keg Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	KKR	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 (Dokumen)	1	995.598.762	Perluasan dan Perlindungan Lahan
51	Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	KKR	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	2.252.606.315	Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	KKR	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	2.572.210.265	PPHP Hortikultura
52	Keg Pembangunan Prasarana Pertanian	KKR	Jumlah Laporan Pembangunan Prasarana Pertanian (Laporan)	1	26.429.003.901	Keg Pembangunan Prasarana Pertanian	KKR	Jumlah Laporan Pembangunan Prasarana Pertanian (Laporan)	1	39.564.363.267	
53	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	KKR	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara (Unit)	9	0	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	KKR	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara (Unit)	9	754.069.711	Irigasi Pertanian dan Pembiayaan
54	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	KKR	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	9	0	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	KKR	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	Irigasi Pertanian dan Pembiayaan

55	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	KKR	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	9	3.760.500.663	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	KKR	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	9	15.482.849.863	Perluasan dan Perlindungan Lahan
56	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	KKR	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	9	3.499.169.244	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	KKR	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	9	3.554.700.509	Irigasi Pertanian dan Pembiayaan
57	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	KKR	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	9	13.882.984.156	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	KKR	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	Irigasi Pertanian dan Pembiayaan
58	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	KKR	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	9	0	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	KKR	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	Irigasi Pertanian dan Pembiayaan
59	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	KKR	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	9	0	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	KKR	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	
60	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	KKR	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	9	5.286.349.838	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	KKR	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	9	19.772.743.184	Perluasan dan Perlindungan Lahan
61	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	KKR	Persentase Perlindungan Pertanian (%)	100	8.410.492.052	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	KKR	Persentase Perlindungan Pertanian (%)	100	10.472.132.776	Bidang LUH, TP, HORTI
62	Keg Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (Laporan)	1	8.410.492.052	Keg Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (Laporan)	1	10.472.132.776	
63	Sub Keg Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	KKR	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	200	3.996.149.356	Sub Keg Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	KKR	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	200	5.534.635.936	Perlindungan TP
64	Sub Keg Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	KKR	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	30	2.806.676.892	Sub Keg Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	KKR	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	30	3.247.158.162	Perlindungan Hortikultura
65	Sub Keg Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	KKR	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	30	1.607.665.804	Sub Keg Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	KKR	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	30	1.690.338.678	Penyelenggaraan Penyuluh
66	Program Penyuluhan Pertanian	KKR	Persentase Kelompok Tani Pertanian Yang Dibina	100	9.426.677.424	Program Penyuluhan Pertanian	KKR	Persentase Kelompok Tani Pertanian Yang Dibina	100	13.831.915.130	Bidang LUH
67	Keg Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	KKR	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Laporan)	1	9.426.677.424	Keg Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	KKR	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Laporan)	1	13.831.915.130	
68	Sub Keg Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	KKR	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2	6.225.168.524	Sub Keg Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	KKR	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2	7.294.666.523	Penyelenggaraan Penyuluh
69	Sub Keg Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	KKR	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2	1.323.756.425	Sub Keg Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	KKR	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2	1.491.461.899	Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan
70	Sub Keg Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	KKR	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	2	1.877.752.475	Sub Keg Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	KKR	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	2	5.045.786.708	Program dan Evaluasi
71	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	KKR	Indeks Ketersediaan Pangan Kabupaten (Poin)	75	383.706.861	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	KKR	Indeks Ketersediaan Pangan Kabupaten (Poin)	75	1.106.953.459	Bidang KP
72	Keg Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Laporan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	383.706.861	Keg Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Laporan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1.106.953.459	
73	Sub Keg Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	KKR	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia(Unit)	2	383.706.861	Sub Keg Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia(Unit)	2	1.106.953.459	Distribusi dan Cadangan Pangan

74	Sub Keg Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	KKR	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia(Unit)	2	0	Sub Keg Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	KKR	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia(Unit)	2	0	Distribusi dan Cadangan Pangan
75	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	KKR	Skor PPH (Poin)	95	3.893.499.579	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	KKR	Skor PPH (Poin)	95	4.206.129.771	Bidang KP
76	Keg Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	KKR	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Laporan)	1	2.692.791.430	Keg Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	KKR	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Laporan)	1	2.787.913.408	
77	Sub Keg Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	KKR	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan(Laporan)	1	316.919.038	Sub Keg Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat produsen dan konsumen wilayah kab/kota	KKR	Informasi Harga Pangan Tingkat produsen dan konsumen wilayah kab/kota (Laporan)	1	365.233.016	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
78	Sub Keg Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	KKR	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia(Laporan)	1	490.894.861	Sub Keg Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	KKR	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia(Laporan)	1	490.894.861	Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
79	Sub Keg Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	KKR	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan(Dokumen)	1	315.398.446	Sub Keg Pemantauan Stok pangan	KKR	Informasi Stok pangan(Dokumen)	1	315.398.446	Distribusi dan Cadangan Pangan
80	Sub Keg Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	KKR	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan(Unit)	1	234.255.280	Sub Keg Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	1	281.063.280	Distribusi dan Cadangan Pangan
81	Sub Keg Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	KKR	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan(Unit)	1	1.335.323.805	Sub Keg Pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	KKR	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan(Unit)	1	1.335.323.805	Distribusi dan Cadangan Pangan
82	Keg Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	0	Keg Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	0	
83	Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota(Laporan)	1	0	Sub Keg Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintahan Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota yang terpelihara (Ton)	1	0	
84	Keg Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	KKR	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (Laporan)	1	1.200.708.149	Keg Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	KKR	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (Laporan)	1	1.418.216.363	
85	Sub Keg Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	KKR	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal(Laporan)	1	1.200.708.149	Sub Keg Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	KKR	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal(Laporan)	1	1.418.216.363	Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
86	Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	KKR	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun(Laporan)	1	0	Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	KKR	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun(Laporan)	1	0	-
87	Program Penanganan Kerawanan Pangan	KKR	Tingkat Kerawanan Pangan (Poin)	25	1.310.044.217	Program Penanganan Kerawanan Pangan	KKR	Tingkat Kerawanan Pangan (Poin)	25	1.659.955.508	Bidang KP
88	Keg Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	KKR	Jumlah Laporan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan (Laporan)	1	283.525.673	Keg Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	KKR	Jumlah Laporan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan (Laporan)	1	360.535.101	
89	Sub Keg Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	KKR	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan(Dokumen)	1	283.525.673	Sub Keg Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	KKR	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan(Dokumen)	1	360.535.101	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
90	Keg Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Laporan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1.026.518.544	Keg Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Laporan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1.299.420.407	
91	Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota(Laporan)	1	148.409.056	Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan gizi Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan gizi Kabupaten/Kota(Laporan)	1	224.056.029	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

92	Sub Keg Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota(Dokumen)	1	878.109.488	Sub Keg Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota(Dokumen)	1	1.075.364.378	Distribusi dan Cadangan Pangan
93	Program Pengawasan Keamanan Pangan	KKR	Persentase Kasus Pangan Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Yang Telah Ditetapkan (%)	100	904.414.816	Program Pengawasan Keamanan Pangan	KKR	Persentase Kasus Pangan Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Yang Telah Ditetapkan (%)	100	957.616.031	Bidang KP
94	Keg Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	904.414.816	Keg Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	957.616.031	
95	Sub Keg Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KKR	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina(Dokumen)	1	0	Sub Keg Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan mutu Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina (Dokumen)	1	0	-
96	Sub Keg Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota(Dokumen)	1	904.414.816	Sub Keg Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota(Dokumen)	1	957.616.031	
					174.988.622.851					211.308.884.822	

2.5. Penelaahan Usulan Progam dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 9. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
2	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian				
3	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	dusun suka majudesa nipah panjang kec.batu ampar, Nipah Panjang, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
4		tr 17 kiri RT.02/Rw.05 Dusun Wonomulyo Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya, Sungai Bulan, Kec. Sungai Raya		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
5		desa sungai rengas kec.sungai kakap, Sungai Rengas, Kec. Sungai Kakap		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
6		dusun sungai pandan desa nipah panjang, Nipah Panjang, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
7		dusun suka maju desa nipah panjang kec.batu ampar, Nipah Panjang, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
8		RT 06/RW 11 Dusun Madani Mekar Sari, Mekar Sari, Kec. Sungai Raya		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
9		Dusun Kasih Rt. 004 Rw. 004/Rt. 005 Rw. 004 Desa Punggur Kapuas, Punggur Kapuas, Kec. Sungai Kakap		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
10		Rt. 001 Rw. 005 Dusun Selat Kering Desa Punggur Kapuas, Punggur Kapuas, Kec. Sungai Kakap		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
11		Gg.Selat Madura Sungai Adong Desa Kuala Dua, Kuala Dua, Kec. Sungai Raya		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
12		Jalan Sungai Berembang Rt.001/Rw.003 Desa Sungai Rengas, Sungai Rengas, Kec. Sungai Kakap		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
13		Desa Radak Baru Kec. Terentang, Radak Baru, Kec. Terentang		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
14		Rt.06 Desa Sungai Itik, Sungai Itik, Kec. Sungai Kakap		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
15		RT.01 RW.01 Dusun Setia Kawan Desa Ambarawa Kecamatan Batu Ampar, Ambarawa, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
16		kuala dua kec.sungai raya, Kuala Dua, Kec. Sungai Raya		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
17		dusun 1, RT.03 RW.01, Ambarawa, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
18		dusun 2, RT.04 RW.02, Ambarawa, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
19		Teluk Nibung, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
20		Rt.08 Dusun Bangun Harjo, Teluk Nibung, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
21		Dusun suka maju, Nipah Panjang, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
22		Parit Banjar Dusun Cahaya Timur, Teluk Nibung, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
23		Rt.01 /Rw.08 Dusun Sungai Terumbuk, Nipah Panjang, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran

24		RT.13/Rw.06 Dusun Sidodadi, Teluk Nibung, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
25		Rt.13 /Rw.06 Dusun Sungai Pandan, Nipah Panjang, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
26		Sui Lemak, Punggur Besar, Kec. Sungai Kakap		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
27		Desa Sungai Belidak, Sungai Belidak, Kec. Sungai Kakap		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
28		Kampung Baru, Sungai Rengas, Kec. Sungai Kakap		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
29		RT.02 RW.12, Parit Keladi, Kec. Sungai Kakap		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
30		Gg. Maksu Dare Parit Sembini Desa Parit Baru, Parit Baru, Kec. Sungai Raya		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
31		Gg. Usman Husein Parit Sembini Desa Parit Baru, Parit Baru, Kec. Sungai Raya		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
32		Komp. Duta Bandara Desa Parit Baru, Parit Baru, Kec. Sungai Raya		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
33		dusun keramat 2 RT 01 RW 06, Kuala Dua, Kec. Sungai Raya		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
34		g. Hidup Baru, Arang Limbung, Kec. Sungai Raya		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
35		Mustika 2 Parit Bugis, Arang Limbung, Kec. Sungai Raya		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
36		Gg. Pelindo Parit Bugis, Arang Limbung, Kec. Sungai Raya		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
37		Nusantara Jaya 2 Parit Bugis, Arang Limbung, Kec. Sungai Raya		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
38		RT.08/RW.09 Arang Limbung, Arang Limbung, Kec. Sungai Raya		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
39		Gg. Mandala Parit Bugis, Arang Limbung, Kec. Sungai Raya		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
40		Gg. Mandiri 3, Teluk Kapuas, Kec. Sungai Raya		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
41		Gg. Mandiri Teluk Kapuas, Teluk Kapuas, Kec. Sungai Raya		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
42		DESA PUNGGUR KECIL, Sungai Kakap		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
43		DESA SUNGAI KAKAP, Sungai Kakap		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
44		DESA SUNGAI RENGAS, Sungai Kakap		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
45		Dusun Mekar Jaya, Dabong, Kec. Kubu		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
46		Dusun Meriam Jaya, Dabong, Kec. Kubu		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
47		Dusun Cahaya Timur, Teluk Nibung, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
48		Dusun Setia Indah, Teluk Nibung, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
49		Dusun Setia Kawan, Ambarawa, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
50		Dusun Sidodadi, Teluk Nibung, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
51		Jl Bimas RT 06 RW 03 Dusun Mekar, Sungai Jawi, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
52		Dusun Sidodadi RT 13, Teluk Nibung, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
53		Jalan gang Jawa desa Padang Tikar Satu, Padang Tikar Satu, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
54		Desa Kuala Karang, Kuala Karang, Kec. Teluk Pakedai		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
55		POKTAN ANUGERAH TANI, Selat Remis, Kec. Teluk Pakedai		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
56		Desa Pal 9 , Parit Keladi 2, Sungai Kakap, Kec. Sungai Kakap		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
57		Simpang Kanan, Kec. Sungai Ambawang		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
58		Desa Sungai Enau, Sungai Enau, Kec. Kuala Mandor B		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
59		jalan Parit Paeran RT. 003 RW.013 Dusun Mulyorejo Desa Limbung, Kab. Kubu Raya, Sungai Raya		200 Unit	Musrempang
60		Dusun Karya Usaha RT.005/RW.002, Kuala Mandor B		1 Unit	Musrempang
61		Cahaya Utara RT 009 RW 001 Dusun Pelita Jaya, Kuala Mandor B		1 Unit	Musrempang
62		Dusun Retok Kuala RT 001 RW 001, Kuala Mandor B		1 Unit	Musrempang
63		DUSUN RADAK MULYA RW 005 RT 012, Terentang		1 Unit	Musrempang

64		Dusun Tanjung Lalang Rt001 Rw001, Terentang		1 Unit	Musrembang
65		DUSUN MAJU JAYA TR 65, Terentang		500 Unit	Musrembang
66		DUSUN MAJU JAYA TR 64, Terentang		500 Unit	Musrembang
67		dusun Parit sembilan, Kubu		1 Unit	Musrembang
68		Tr 31,Dusun Sidodadi Rt 20 Rw 08, Kubu		1 Unit	Musrembang
69		Sawung Galing RT 022 RW 010 Dusun Banjar Laut, Rasau Jaya		1 Unit	Musrembang
70		dusun suka damai rw 001 sd rw 003, Rasau Jaya		1 Unit	Musrembang
71		Jalan Tersier 2 Dusun Suka Damai RT 001 RW 004, Rasau Jaya		1 Unit	Musrembang
72		Jalan tersier 3 Dusun Suka Damai RT 001 RW 004, Rasau Jaya		1 Unit	Musrembang
73		RT 04 RW 01 DUSUN SUKA HARJA DESA ARUS DERAS, Teluk Pakedai		1 Unit	Musrembang
74		RT 07 RW 02 DUSUN SUKA RAJA DESA ARUS DERAS, Teluk Pakedai		1 Unit	Musrembang
75		Dusun Kasih Rt.001/Rw.004, Sungai Kakap		1 Unit	Musrembang
76		Dusun Cahaya Timur RT 025/011, Batu Ampar		2 Unit	Musrembang
77	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	dusun 1, RT.03 RW.01, Ambarawa, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
78		dusun 2, RT.04 RW.02, Ambarawa, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
79		RT.001/RW.004 Sampai RT.08/RW.003 Desa Seruat Dua Kecamatan Kubu		5 Unit	Musrembang
80		RT.001/RW.004 Sampai RT.08/RW.003 Desa Seruat Dua Kecamatan Kubu		5 Unit	Musrembang
81		RT.001/RW.001 Dusun Suka Maju Desa Kuala Karang Tanggul Pertanian, Teluk Pakedai		1 Unit	Musrembang
82	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Desa Radak Baru Kec. Terentang, Radak Baru, Kec. Terentang		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
83		Rt.06 Desa Sungai Itik, Sungai Itik, Kec. Sungai Kakap		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
84		Dusun Mekar Jaya, Dabong, Kec. Kubu		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
85		Dusun Meriam Jaya, Dabong, Kec. Kubu		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
86		Dusun Cahaya Timur, Teluk Nibung, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
87		Dusun Setia Indah, Teluk Nibung, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
88		Dusun Setia Kawan, Ambarawa, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
89		Dusun Sidodadi, Teluk Nibung, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
90		Desa Kuala Karang, Kuala Karang, Kec. Teluk Pakedai		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
91		POKTAN ANUGERAH TANI, Selat Remis, Kec. Teluk Pakedai		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
92		RT.008 dan RT.011, RW.003 Desa Seruat Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, Kubu		15 Unit	Musrembang
93		Dusun Karya Muda, Dusun Karya Utama dan Dusun Karya Maju, Sungai Kakap		9 Unit	Musrembang
94		Desa Kalimas Dusun Beringin, Sungai Kakap		11 Unit	Musrembang
95	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				
96	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				
97	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Nipah Panjang, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
98		Teluk Nibung, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran

99		Dusun Setia Baru, Teluk Nibung, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
100		Nipah Panjang, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
101		Batu Ampar, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
102		Dusun Bangun Harjo, Teluk Nibung, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
103		Pinang Luar, Kec. Kubu		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
104		Poktan Arang Jaya Desa Arang Limbug, Arang Limbung, Kec. Sungai Raya		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
105		desa arang limbung kecamatan sungai raya, Arang Limbung, Kec. Sungai Raya		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
106		Desa Medan Mas, Medan Mas, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
107		Desa Padang Tikar Dua, Padang Tikar Dua, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
108		Desa Padang Tikar Satu, Padang Tikar Satu, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
109		Desa Sungai Jawi, Sungai Jawi, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
110		Desa Tasik Malaya, Tasik Malaya, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
111		Desa Nipah Panjang, Nipah Panjang, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
112		Desa Teluk Nibung, Teluk Nibung, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
113		Kec. Teluk pakedai, Teluk Pakedai		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
114		RT 004 RW 012 Dusun Martapura, Kab. Kubu Raya, Sungai Raya		2 unit	Musreimbang
115		Desa Pancaroba Tersebar di 6 Dusun (Dusun Pancaroba, Dusun Sangku, Dusun Sairi, Dusun Tapah, Dusun Cangko Manis, Dusun Sairi) Membutuhkan 6 unit Handtraktor, Sungai Ambawang		6 Unit	Musreimbang
116	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Punggur Besar, Punggur Besar, Kec. Sungai Kakap		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
117		Desa Kuala Mandor B, Kuala Mandor B, Kec. Kuala Mandor B		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
118		Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
119		Dusun Bangun Harjo, Teluk Nibung, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
120		Rt.24/Rw.11 Dusun Cahaya Timur, Teluk Nibung, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
121		Batu Ampar, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
122		Batu Ampar, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
123		Nipah Panjang, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
124		Desa Sungai Jawi, Sungai Jawi, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
125		parit senang hati RT 02 RW 06, Kab. Kubu Raya, Sungai Raya		1 Unit	Musreimbang
126		GAPOKTAN DESA AIR PUTIH, Kubu		8 Unit	Musreimbang
127		Jalan Rajawali Rasau Jaya Tiga, RT 002 RW 001 Dusun I Sangkar Mas, Rasau Jaya		1 Unit	Musreimbang
128	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten / Kota				
129	Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman	Kec. Rasau Jaya, Rasau Jaya Umum, Kec. Rasau Jaya		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
130		Desa Kubu, Kec. Kubu		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
131		Desa Kubu Kecamatan Kubu		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
132		Kecamatan Sungai Raya		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
133		Kecamatan Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
134		RT 004 RW 012 Dusun Martapura, Kab. Kubu Raya, Sungai Raya		1 Liter	Musreimbang

135	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman	Punggur Kecil, Kec. Sungai Kakap		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
136		Kecamatan Sungai kakap, Sungai Kakap		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
137		jl. parit bakti desa sungai asam, Sungai Asam, Kec. Sungai Raya		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
138		Muara Tiga, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
139		Nipah Panjang, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
140		Teluk Nibung, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
141		Kecamatan Sungai Raya, KAB. KUBU RAYA		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
142		Kecamatan Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
143		kecamatan kakap, Sungai Kakap, Kec. Sungai Kakap		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
144		Dusun Jaya Sakti dan Dusun Pelita Jaya, Kuala Mandor B		1.000 Liter	Musrembang
145		Dusun Padi Raya, Dusun Jaya, Dusun Ampaning, Jaya Raya, Saga dan Sunge Ano (bibit mangga dan durian), Kuala Mandor B		2.000 Liter	Musrembang
146		Desa Bintang Mas, Rasau Jaya		100 Liter	Musrembang
147		Desa Pasir Putih, Teluk Pakedai		1 Liter	Musrembang
148	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				
149	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota				
150	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Punggur Kecil, Punggur Kecil, Kec. Sungai Kakap		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
151		Muara Tiga, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
152		Kecamatan Sungai Kakap, Sungai Kakap		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
153		Kecamatan Sungai Kakap, Sungai Kakap		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
154		kecamatan Sungai Raya, KAB. KUBU RAYA		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
155		kecamatan sungai kakap, Sungai Kakap, Kec. Sungai Kakap		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
156		Desa Mega Timur, Kab. Kubu Raya, Sungai Ambawang		100 Liter	Musrembang
157	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura,	Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
158		Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
159		Batu Ampar, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
160		Nipah Panjang, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
161		Teluk Nibung, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
162		Desa Padang Tikar Dua, Padang Tikar Dua, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran
163		Desa Padang Tikar Satu, Padang Tikar Satu, Kec. Batu Ampar		1 Paket	Pokok-pokok pikiran

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Pembangunan Pertanian yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian RI pada tahun 2024 diarahkan pada empat aspek yaitu:

1. Produksi dan Produktivitas meliputi:
 - a. Gerakan nasional peningkatan produktivitas, produksi dan ekspor
 - b. Peningkatan populasi ternak
 - c. Pengembangan SDM pertanian
 - d. Family Farming
 - e. Pertanian masuk sekolah
2. Rendah biaya meliputi:
 - a. Fasilitasi pembiayaan pertanian (KUR bunga rendah)
 - b. Pengembangan kawasan berbasis korporasi
 - c. Bantuan / subsidi pertanian tepat sasaran
3. Mekanisasi dan Research terdiri dari:
 - a. Pengembangan dan penerapan mekanisasi pertanian (pra dan pasca panen)
 - b. Akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi
4. Ekspansi pertanian terdiri dari:
 - a. Optimasi pemanfaatan lahan
 - b. Penyediaan air (irigasi, embung, bangunan air)

Program Utama Kementerian Pertanian Tahun 2024

1. Pengembangan Kostra Tani dan pembangunan SDM pertanian melalui pendidikan dan pelatihan vokasi
2. Fasilitasi pembiayaan, infrastruktur dan Alsintan
3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Berbasis Korporasi

4. Pengembangan Kawasan Hortikultura Berdaya Saing
5. Gerakan Peningkatan Produksi, Nilai Tambah dan Daya Saing Perkebunan
6. Peningkatan Populasi, Produktivitas dan Mutu Genetik Ternak Potong / Unggas
7. Akselerasi Pemanfaatan Inovasi Teknologi dan Produksi Benih/Bibit
8. Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan (Family Farming, Pertanian Masuk Sekolah, Diversifikasi Pangan) Serta Distribusi dan Pengendalian Harga Pangan Pokok
9. Penguatan Layanan Perkarantinaaan dan Akselerasi Ekspor Melalui Program Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (GraTIEks)

Tabel 10. Hasil Rakortek Bidang PSP Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	LAHAN	IRIGASI DAN PEMBIAYAAN				ALSINTAN PUPES			
		Optimasi Lahan Rawa (Ha)	Perpipaan/ Perpompa- an Horti (Unit)	Jaring- an Perpom- pa-an TP (Unit)	Jaringa n Irigasi Tersier (Ha)	Asura nsi Pertan- ian (Ha)	TR2 (Rot ary)	Pompa Air Portabl e 3 inchi	Cultiv ator	Hand Sprayer
1	Bengkayang	-	1	1	600	3.000	10	18	8	-
2	Landak	500	-	-	500	10.00 0	20	-	5	5
3	Kapuas Hulu	500	-	2	400	1.000	10	-	-	5
4	Ketapang	2.000	-	1	300	10.00 0	14	60	-	10
5	Mempawah	2.000	1	1	-	3.000	10	-	5	24
6	Sambas	2.000	1	2	400	6.000	20	30	5	-
7	Sanggau	3.000	-	-	400	4.000	10	15	-	5
8	Sintang	-	-	-	200	1.000	5	-	-	-
11	Melawi	500	-	-	-	1.000	10	25	-	15
12	Sekadau	-	-	-	400	1.000	2	5	-	5
13	Kubu Raya	2.500	1	1	400	2.000	34	30	3	5
14	Kayong Utara	2.000	-	-	300	3.000	8	20	-	-
9	Kota Pontianak	-	-	-	-	-	-	1	2	-
10	Kota Singkawang	-	-	-	100	-	4	-	3	3
Total		15.000	4	8	4.000	45.00 0	157	204	31	77

Sumber : Rakortek Kementan 2023

Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2024

Tabel 11. Hasil Rakortek Bidang Hortikultura Tahun 2024

NO	PROVINSI & KABUPATEN/ KOTA	Kawasan Bawang Merah (Ha)	Kawasan Aneka Cabai (Ha)	Kawasan Tanaman Obat (Ha)	Kawasan Pisang (Ha)	Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura		
						Pasca panen CB (Unit)	Pasca panen HL (Unit)	Pengo- lahan HL (Unit)
14	KALBAR	346	417	30	250	5	5	2
	Dinas Provinsi	346	417	30	-			
1	Kab. Bengkayang	40	40			1		
2	Kab. Landak	30	30	10		1		
3	Kab. Kapuas Hulu	20	20					
4	Kab. Ketapang	30	30					
5	Kab. Mempawah	20	41	10	100	1		
6	Kab. Sambas	30	35				1	1
7	Kab. Sanggau	40	40				1	
8	Kab. Sintang	20	20					
9	Kab. Melawi	30	45			1	1	
10	Kab. Sekadau	20	20					
11	Kab. Kubu Raya	40	36	10	150	1	1	1
12	Kab. Kayong Utara	20	20					
13	Kota Pontianak	-	-				1	
14	Kota Singkawang	6	40					

Sumber : Rakortek Kementan 2023

Tabel 12. Hasil Rakortek Bidang Tanaman Pangan Tahun 2024

NO	PROVINSI & KABUPATEN/ KOTA	Budidaya Ubi Kayu	Budidaya Kacang Hijau	Budidaya Padi Rawa	Peningkatan Produktivitas Padi Sawah	Pengembangan Kerjasama Budidaya Jagung	Bantuan Benih Jagung Hibrida Umum 3	Bantuan Benih Padi Inbrida Sawah
14	KALBAR	700	350	3.400	7.400	7.750	20.250	55.200
	Dinas Provinsi							
	BBI							
	BPSB							
1	Kab. Bengkayang		100			2.500	5.000	3.150
2	Kab. Landak	100	-	700	2.200	1.500	3.000	11.300
3	Kab. Kapuas Hulu	100	-			-	1.000	2.500
4	Kab. Ketapang	200	-	200		-	1.500	4.700
5	Kab. Mempawah		-			-	1.000	2.500
6	Kab. Sambas		200	1.000	3.000	1.250	2.000	7.000
7	Kab. Sanggau	100				1.750	2.000	6.100
8	Kab. Sintang	100				-	1.000	8.000
9	Kab. Melawi					-	1.000	2.000
10	Kab. Sekadau			300		-	1.000	3.000
11	Kab. Kubu Raya	100	50	1.000	2.200	750	750	1.500
12	Kab. Kayong Utara			200				2.350
13	Kota Pontianak							100
14	Kota Singkawang						1.000	1.000

Sumber : Rakortek Kementan 2023

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra SKPD.

3.2.1. Tujuan

Berdasarkan isu strategis yang dihasilkan menggunakan analisis pohon masalah maka tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya 2019-2024 bidang pertanian dirumuskan melalui pencapaian 2 (dua) tujuan strategis yaitu:

- 1. Meningkatkan produktivitas pertanian
- 2. Meningkatkan kesejahteraan petani

Tabel 13. Tujuan dan Indikatornya

No	Tujuan	Indikator	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	Produksi Padi (Ton)	138.450	139.100	139.750

No	Tujuan	Indikator	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	Produksi Padi (Ton)	140.400	141.050	141.700

3.2.2. Sasaran

Sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024 ada 3 (tiga) yaitu:

- 1. Meningkatkan produksi pertanian
- 2. Meningkatkan nilai tambah pertanian

Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2024

3. Meningkatkan ketahanan pangan

Tabel 14. Sasaran dan Indikatornya

No	Sasaran	Indikator	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	PDRB Sektor Pertanian (Juta)	1.239.509,00	1.280.385,00	1.290.000,00

No	Sasaran	Indikator	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	PDRB Sektor Pertanian (Juta)	1.300.000,00	1.310.000,00	1.320.000,00

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 15. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2024

Tabel 15. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
2.09.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan								
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Kab Kubu Raya	100	13.545.910.152	DAU	Sekretariat	100	13.545.910.152
2.09.01.2.01	Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	Kab Kubu Raya	100	231.720.267	DAU		100	231.720.267
2.09.01.2.01.0001	Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kab Kubu Raya	4	165.916.189	DAU	Rencana Kerja dan Keuangan	4	165.916.189
2.09.01.2.01.0006	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Kab Kubu Raya	0	-	DAU	Rencana Kerja dan Keuangan	0	-
2.09.01.2.01.0007	Sub Keg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Kab Kubu Raya	2	65.804.078	DAU	TU dan Kepegawaian	2	65.804.078
2.09.01.2.02	Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	Kab Kubu Raya	100	12.505.300.905,00	DAU		100	12.505.300.905,00
2.09.01.2.02.0001	Sub Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Kab Kubu Raya	123	12.485.300.905	DAU	TU dan Kepegawaian	110	12.485.300.905
2.09.01.2.02.0004	Sub Keg Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Kab Kubu Raya	0	-	DAU	Perlengkapan dan Umum	0	-
2.09.01.2.02.0005	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Kab Kubu Raya	1	20.000.000	DAU	Rencana Kerja dan Keuangan	1	20.000.000

		Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)							
2.09.01.2.02.0007	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Kab Kubu Raya	0	-	DAU	Rencana Kerja dan Keuangan	0	-
2.09.01.2.05	Keg Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	Kab Kubu Raya	100	187.000.000	DAU		100	186.999.999,84
2.09.01.2.05.0002	Sub Keg Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Kab Kubu Raya	0	-	DAU	TU dan Kepegawaian	0	-
2.09.01.2.05.0009	Sub Keg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Kab Kubu Raya	16	155.000.000	DAU	TU dan Kepegawaian	10	155.000.000
2.09.01.2.05.0010	Sub Keg Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Kab Kubu Raya	50	32.000.000	DAU	TU dan Kepegawaian	50	32.000.000
2.09.01.2.05.0011	Sub Keg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Kab Kubu Raya	0	-	DAU	TU dan Kepegawaian	0	-
2.09.01.2.06	Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah (%))	Kab Kubu Raya	100	137.114.300,00	DAU		100	137.114.300,00
2.09.01.2.06.0001	Sub Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab Kubu Raya	0	-	DAU	Perlengkapan dan Umum	0	-
2.09.01.2.06.0004	Sub Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab Kubu Raya	1	16.798.500,00	DAU	Perlengkapan dan Umum	1	16.798.500,00
2.09.01.2.06.0005	Sub Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kab Kubu Raya	1	1.980.000,00	DAU	Perlengkapan dan Umum	1	1.980.000,00
2.09.01.2.06.0006	Sub Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Kab Kubu Raya	1	6.205.000,00	DAU	Perlengkapan dan Umum	1	6.205.000,00
2.09.01.2.06.0009	Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab Kubu Raya	1	112.130.800,00	DAU	Perlengkapan dan Umum	1	112.130.800,00
2.09.01.2.07.	Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	Kab Kubu Raya	0	-	DAU		0	-

2.09.01.2.07.	Sub Keg Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Kab Kubu Raya	0	-	DAU	Perlengkapan dan Umum	0	-
2.09.01.2.07.0005	Sub Keg Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Kab Kubu Raya	0	-	DAU	Perlengkapan dan Umum	0	-
2.09.01.2.07.	Sub Keg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Kab Kubu Raya	0	-	DAU	Perlengkapan dan Umum	0	-
2.09.01.2.07.	Sub Keg Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	Kab Kubu Raya	0	-	DAU	Perlengkapan dan Umum	0	-
2.09.01.2.07.0010	Sub Keg Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Kab Kubu Raya	0	-	DAU	Perlengkapan dan Umum	0	-
2.09.01.2.08	Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Kab Kubu Raya	1	396.809.680	DAU		1	396.809.680
2.09.01.2.08.0002	Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kab Kubu Raya	1	114.000.000	DAU	Perlengkapan dan Umum	1	114.000.000
2.09.01.2.08.0003	Sub Keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab Kubu Raya	0	-	DAU	Perlengkapan dan Umum	0	-
2.09.01.2.08.0004	Sub Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab Kubu Raya	2	282.809.680	DAU	Perlengkapan dan Umum	1	282.809.680
2.09.01.2.09	Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)	Kab Kubu Raya	90	87.965.000	DAU		88	87.965.000
2.09.01.2.09.0002	Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kab Kubu Raya	90	87.965.000	DAU	Perlengkapan dan Umum	88	87.965.000
2.09.01.2.09.0010	Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Kab Kubu Raya	0	-	DAU	Perlengkapan dan Umum	0	-
2.09.01.2.09.	Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Kab Kubu Raya	0	-	DAU	Perlengkapan dan Umum	0	-
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedauletan Dan Kemandirian Pangan	Indeks Ketersediaan Pangan Kabupaten (Poin)	Kab Kubu Raya	71	247.496.598	DAU	Bidang KP	71	371.244.897
2.09.02.2.01	Keg Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Kab Kubu Raya	1	247.496.598	DAU		1	371.244.897

	Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)							
2.09.02.2.01.0001	Sub Keg Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten / Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota (Unit)	Kab Kubu Raya	2	247.496.598	DAU	Distribusi dan Cadangan Pangan	3	371.244.897
2.09.02.2.01.0003	Sub Keg Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	Kab Kubu Raya	0	-	DAU	Distribusi dan Cadangan Pangan	0	-
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH (Poin)	Kab Kubu Raya	76	252.630.192 z	DAU	Bidang KP	76	296.763.344
2.09.03.2.01	Keg Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Laporan)	Kab Kubu Raya	1	95.121.978	DAU		1	99.878.077
2.09.03.2.01.0001	Sub Keg Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten / Kota	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten / Kota (Laporan)	Kab Kubu Raya	1	48.313.978	DAU	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	2	50.729.677
2.09.03.2.01.0002	Sub Keg Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	Kab Kubu Raya	0	-	DAU	Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	0	-
2.09.03.2.01.0004	Sub Keg Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan(Dokumen)	Kab Kubu Raya	0	-	DAU	Distribusi dan Cadangan Pangan	0	-
2.09.03.2.01.0005	Sub Keg Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten / Kota	Jumlah Kelembagaan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan (Unit)	Kab Kubu Raya	1	46.808.000	DAU	Distribusi dan Cadangan Pangan	1	49.148.400
2.09.03.2.01.0006	Sub Keg Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan(Unit)	Kab Kubu Raya	0	-	DAU	Distribusi dan Cadangan Pangan	0	-
2.09.03.2.02.	Keg Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota (Laporan)	Kab Kubu Raya	0	-	DAU		0	-
2.09.03.2.02.01.	Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota(Laporan)	Kab Kubu Raya	0	-	DAU	-	0	-
2.09.03.2.04	Keg Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (Laporan)	Kab Kubu Raya	1	157.508.214	DAU		1	196.885.268

2.09.03.2.04.0002	Sub Keg Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal(Laporan)	Kab Kubu Raya	1	157.508.214	DAU	Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	196.885.268
2.09.03.2.04.0003	Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun(Laporan)	Kab Kubu Raya	0	-	DAU	-	0	-
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tingkat Kerawanan Pangan (Poin)	Kab Kubu Raya	24	249.911.291	DAU	Bidang KP	24	330.485.279
2.09.04.2.01	Keg Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Laporan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan (Laporan)	Kab Kubu Raya	1	77.009.428	DAU		1	80.859.899
2.09.04.2.01.0001	Sub Keg Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	Kab Kubu Raya	1	77.009.428	DAU	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1	80.859.899
2.09.04.2.02	Keg Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	Kab Kubu Raya	1	172.901.863	DAU		1	249.625.379
2.09.04.2.02.0001	Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan gizi Kabupaten/Kota(Laporan)	Kab Kubu Raya	1	75.646.973	DAU	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1	79.429.322
2.09.04.2.02.0002	Sub Keg Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kab Kubu Raya	1	97.254.890	DAU	Distribusi dan Cadangan Pangan	1	170.196.058
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Kasus Pangan Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Yang Telah Ditetapkan (%)	Kab Kubu Raya	100	58.244.230	DAU	Bidang KP	100	61.156.442
2.09.05.2.01	Keg Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	Kab Kubu Raya	1	58.244.230	DAU		1	61.156.442
2.09.05.2.01.	Sub Keg Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina(Dokumen)	Kab Kubu Raya	0	-	DAU	-	0	-
2.09.05.2.01.04	Sub Keg Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota(Dokumen)	Kab Kubu Raya	1	58.244.230	DAU	Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	3	61.156.442
3.	Urusan Pemerintahan Pilihan								
3.07.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan								

3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	Kab Kubu Raya	3,5	1.460.975.583	DAU	Bidang PSP, Bidang TP, Bidang Horti	3,5	2.161.048.337
3.27.02.2.01	Keg Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Laporan)	Kab Kubu Raya	1	746.202.649	DAU		1	1.119.303.974
3.27.02.2.01.0001	Sub Keg Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	Kab Kubu Raya	1	321.466.438	DAU	Alsintan dan Pupes	1	482.199.657
3.27.02.2.01.0002	Sub Keg Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	Kab Kubu Raya	1	424.736.211	DAU	P2HP TP	1	637.104.317
3.27.02.2.02	Keg Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota (Laporan)	Kab Kubu Raya	1	714.772.934	DAU		1	1.041.744.364
3.27.02.2.02.0001	Sub Keg Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (VUB)	Kab Kubu Raya	1	445.997.404	DAU	Pembenihan dan Produksi Hortikultura	1	668.996.106
3.27.02.2.02.0002	Sub Keg Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	Kab Kubu Raya	1	147.115.380	DAU	Pembenihan dan Produksi TP	1	220.673.070
3.27.02.2.02.0003	Sub Keg Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	Kab Kubu Raya	1	121.660.150	DAU	Pembenihan dan Produksi TP	1	152.075.188
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Daya dukung prasarana pertanian terhadap produktivitas pertanian (%)	Kab Kubu Raya	100	4.427.539.703	DAU	Bidang PSP, Bidang Horti	100	5.193.708.292
3.27.03.2.01	Keg Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian (Laporan)	Kab Kubu Raya	1	121.191.450	DAU		1	127.251.023
3.27.03.2.01.0002	Sub Keg Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	Kab Kubu Raya	0		DAU	Perluasan dan Perlindungan Lahan	0	-
3.27.03.2.01.0003	Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	Kab Kubu Raya	1	121.191.450	DAU	PPHP Hortikultura	1	127.251.023
3.27.03.2.02	Keg Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Pembangunan Prasarana Pertanian (Laporan)	Kab Kubu Raya	1	4.306.348.253	DAU		1	5.066.457.270
3.27.03.2.02.0002	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	Kab Kubu Raya	0		DAU	Irigasi Pertanian dan Pembiayaan	0	-

3.27.03.2.02.0003	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	Kab Kubu Raya	9	2.773.403.535	DAU	Perluasan dan Perlindungan Lahan	9	3.466.754.419
3.27.03.2.02.0004	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	Kab Kubu Raya	9	74.332.970	DAU	Irigasi Pertanian dan Pembiayaan	9	148.665.940
3.27.03.2.02.0010	Sub Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani direhabilitasi (Unit)	Kab Kubu Raya	9	550.766.824	DAU	Irigasi Pertanian dan Pembiayaan	9	
3.27.03.2.02.0006	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	Kab Kubu Raya	0		DAU	Irigasi Pertanian dan Pembiayaan	0	-
3.27.03.2.02.0008	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	Kab Kubu Raya	0		DAU	-	0	-
3.27.03.2.02.0009	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	Kab Kubu Raya	9	907.844.924	DAU	Perluasan dan Perlindungan Lahan	9	624.886.675
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Perlindungan Pertanian (%)	Kab Kubu Raya	100	1.046.990.211	DAU	Bidang LUH, TP, HORTI	100	1.367.019.009
3.27.05.2.01	Keg Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (Laporan)	Kab Kubu Raya	1	1.046.990.211	DAU		1	1.367.019.009
3.27.05.2.01.0001	Sub Keg Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	Kab Kubu Raya	200	672.396.437	DAU	Perlindungan TP	200	840.495.546
3.27.05.2.01.0002	Sub Keg Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	Kab Kubu Raya	35	296.000.000	DAU	Perlindungan Hortikultura	30	444.000.000
3.27.05.2.01.0003	Sub Keg Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	Kab Kubu Raya	30	78.593.774	DAU	Penyelenggaraan Penyuluh	30	82.523.463
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Pertanian Yang Dibina	Kab Kubu Raya	100	873.541.064	DAU	Bidang LUH	100	1.165.638.459
3.27.07.2.01	Keg Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Laporan)	Kab Kubu Raya	1	873.541.064	DAU		1	1.165.638.459

3.27.07.2.01.0001	Sub Keg Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	Kab Kubu Raya	2	294.848.518	DAU	Penyelenggaraan Penyuluh	2	442.272.776
3.27.07.2.01.0002	Sub Keg Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	Kab Kubu Raya	2	174.627.313	DAU	Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan	2	218.284.141
3.27.07.2.01.0003	Sub Keg Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	Kab Kubu Raya	2	404.065.233	DAU	Program dan Evaluasi	2	505.081.541
	Jumlah				22.163.239,024				24.492.974.211

BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 16. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024

Kode	Uraian	Sumber Dana	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2. 09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
2. 09. 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		13.545.910.152	0	13.545.910.152
2. 09. 01. 2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		231.720.267	0	231.720.267
2. 09. 01. 2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	165.916.189	0	165.916.189
2. 09. 01. 2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	65.804.078	0	65.804.078
2. 09. 01. 2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12.505.300.905	0	12.505.300.905
2. 09. 01. 2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12.485.300.905	0	12.485.300.905
2. 09. 01. 2.02. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.000.000	0	20.000.000
2. 09. 01. 2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		187.000.000	0	187.000.000
2. 09. 01. 2.05. 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	155.000.000	0	155.000.000
2. 09. 01. 2.05. 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	32.000.000	0	32.000.000
2. 09. 01. 2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		137.114.300	0	137.114.300
2. 09. 01. 2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16.798.500,00	0	16.798.500,00
2. 09. 01. 2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.980.000,00	0	1.980.000,00

2. 09. 01. 2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	6.205.000,00	0	6.205.000,00
2. 09. 01. 2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	112.130.800,00	0	112.130.800,00
2. 09. 01. 2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		396.809.680	0	396.809.680
2. 09. 01. 2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	114.000.000	0	114.000.000
2. 09. 01. 2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	282.809.680	0	282.809.680
2. 09. 01. 2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87.965.000	0	87.965.000
2. 09. 01. 2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	87.965.000	0	87.965.000
2. 09. 02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		247.496.598	0	247.496.598
2. 09. 02. 2.01.	Sub Keg Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten / Kota (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)		247.496.598	0	247.496.598
2. 09. 02. 2.01. 0001	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	247.496.598	0	247.496.598
2. 09. 03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		252.630.192	0	252.630.192
2. 09. 03. 2.01.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		95.121.978	0	95.121.978
2. 09. 03. 2.01. 0001	Sub Keg Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten / Kota (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	48.313.978	0	48.313.978
2. 09. 03. 2.01. 0005	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	46.808.000	0	46.808.000
2. 09. 03. 2.04.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		157.508.214	0	157.508.214

2. 09. 03. 2.04. 0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	157.508.214	0	157.508.214
2. 09. 04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		249.911.291	0	249.911.291
2. 09. 04. 2.01.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		77.009.428	0	77.009.428
2. 09. 04. 2.01. 0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	77.009.428	0	77.009.428
2. 09. 04. 2.02.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		172.901.863	0	172.901.863
2. 09. 04. 2.02. 0001	Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan gizi Kabupaten/Kota (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75.646.973	0	75.646.973
2. 09. 04. 2.02. 0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	97.254.890	0	97.254.890
2. 09. 05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		54.323.730	3.920.500	58.244.230
2. 09. 05. 2.01.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		54.323.730	3.920.500	58.244.230
2. 09. 05. 2.01. 0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	54.323.730	3.920.500	58.244.230
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3. 27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
3. 27. 02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		697.434.581	48.768.068	1.460.975.583
3. 27. 02. 2.01.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		697.434.581	48.768.068	746.202.649
3. 27. 02. 2.01. 0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	304.650.702	16.815.736	321.466.438
3. 27. 02. 2.01. 0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	392.783.879	31.952.332	424.736.211
3. 27. 02. 2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		714.772.934		

3. 27. 02. 2.02. 0001	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	445.997.404		
3. 27. 02. 2.02. 0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	147.115.380		
3. 27. 02. 2.02. 0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	121.660.150		
3. 27. 03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		2.791.566.000	56.170.505	4.427.539.703
3. 27. 3. 2,01.	Pengembangan Prasarana Pertanian		121.191.450		
3. 27. 03. 2.01. 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	121.191.450		
3. 27. 3. 2,02.	Pembangunan Prasarana Pertanian		2.791.566.000	56.170.505	4.306.348.253
3. 27. 03. 2.02. 0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus	2.738.934.735	34.468.800	2.773.403.535
3. 27. 03. 2.02. 0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	52.631.265	21.701.705	74.332.970
3. 27. 03. 2.02. 0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	907.844.924		
3. 27. 03. 2.02. 0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	550.766.824		
3. 27. 05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		1.046.990.211		
3. 27. 05. 2.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		1.046.990.211		
3. 27. 05. 2.01. 0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	672.396.437		
3. 27. 05. 2.01. 0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	296.000.000		

3. 27. 05. 2.01. 0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	78.593.774		
3. 27. 07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		154.065.233	250.000.000	873.541.064
3. 27. 7. 2,01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		154.065.233	250.000.000	873.541.064
3. 27. 07. 2.01. 0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus	294.848.518		
3. 27. 07. 2.01. 0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	174.627.313		
3. 27. 07. 2.01. 0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus	154.065.233	250.000.000	404.065.233
	JUMLAH		21.804.379.951	358.859.073	22.163.239.024

BAB 5. PENUTUP

Penyusunan Anggaran merupakan satu instrumen penting di dalam manajemen karena merupakan bagian dari fungsi manajemen. Di dunia bisnis maupun di organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin. Program/kegiatan dan pendanaan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2024 sudah semaksimal mungkin dalam menerapkan beberapa prinsip penyusunan dokumen perencanaan anggaran sebagai berikut:

Transparansi dan akuntabilitas anggaran. Dokumen perencanaan anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Efisiensi dan efektivitas. Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan maksimal untuk kepentingan masyarakat.

3. Disusun dengan pendekatan kinerja. Perencanaan anggaran disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.
4. Program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu

Raya Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sungai Raya, Juli 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Kubu Raya

Drs. HERI SUPRIYANTO, M.Si.
Pembina Tingkat I
Nip.19640714 199203 1 008